

SINOPSIS

Era otonomi daerah telah membawa perubahan paradigma terutama perubahan pada pelaksanaan fungsi yang dijalankan pemerintah daerah, dalam rangka menentukan kebijaksanaan pembangunan di daerah, memberi penilaian atas pembangunan dan mengusahakan keterpaduan antara rencana nasional dan daerah, maka dibentuklah Bappeda yang merupakan institusi teknis Pemerintah Daerah yang secara langsung bertanggung jawab dalam rangka perencanaan pembangunan di daerah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul “ PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM MEWUJUDKAN PERENCANAAN YANG PARTISIPATIF (STUDI KASUS : PERENCANAAN DI KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU) “ dimana penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melukiskan dan mengeksploitasi fenomena kenyataan sosial yang ada, guna menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan institusi teknis Pemerintah Daerah yang secara langsung bertanggung jawab dalam rangka perencanaan pembangunan di Daerah. Bappeda berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan kebijakan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, Bappeda memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain sehingga keikutsertaan tersebut diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Bappeda, khususnya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang nantinya kebijakan tersebut dapat berguna dan menjadi pedoman bagi para stakeholders pengelola pembangunan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bintan sangat penting sekali. Dengan aspirasi maupun masukan yang mereka berikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) membantu Bappeda dalam pembangunan daerah sesuai keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Bintan dalam perencanaan pembangunan daerah dirasakan masih kurang. Setiap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan hanya sebagian Instansi maupun Stakeholders yang hadir dalam kegiatan musrenbang. Padahal aspirasi mereka sangat diperlukan untuk membantu Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan. Walaupun tidak semua aspirasi masyarakat yang disetujui untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disebabkan masih kurangnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, namun partisipasi mereka dalam memberikan aspirasi sangat dibutuhkan.

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Bappeda sebagai unsur penunjang Pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah hendaknya lebih giat dalam melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait agar mereka dapat ikut berperan dalam perencanaan pembangunan ini dengan memberikan aspirasi mereka. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka perencanaan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengelola pembangunan daerah.